

## **Dampak Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Terhadap Keberlanjutan Perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan**

**Firman**<sup>✉</sup>

Program Studi Bisnis Digital, Universitas Teknologi Akba Makassar

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dampak manajemen keuangan sektor publik terhadap keberlanjutan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan data dari 2012 hingga 2023. Dengan menganalisis belanja pemerintah (EXPENSE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kami mengeksplorasi hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional. Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) mengonfirmasi bahwa kedua variabel bersifat stasioner pada level pertama, sehingga cocok untuk analisis ekonometrika. Statistik deskriptif mengungkapkan fluktuasi signifikan dalam belanja pemerintah dan PDRB, dengan rata-rata belanja sebesar 160.215,8 juta dan deviasi standar 28.236,43 juta. PDRB rata-rata 2.921.667 juta dengan deviasi standar 5.799.190 juta, menunjukkan variabilitas substansial. Hasil uji Granger causality menunjukkan tidak ada hubungan kausal signifikan antara PDRB dan belanja pemerintah, mengindikasikan bahwa perubahan PDRB tidak secara langsung mempengaruhi belanja pemerintah dan sebaliknya. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi fiskal mungkin tidak selalu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Pembuat kebijakan perlu fokus pada efisiensi belanja dan alokasi sumber daya strategis, dengan menekankan infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Manajemen Keuangan Sektor Publik, Keberlanjutan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Kebijakan Fiskal.

### **Abstract**

This research examines the impact of public sector financial management on economic sustainability in South Sulawesi Province, using data from 2012 to 2023. By analyzing government expenditure (EXPENSE) and Gross Regional Domestic Product (PDRB), we explored the relationship between fiscal policies and regional economic growth. The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test confirmed that both variables are stationary at their first levels, making them suitable for econometric analysis. Descriptive statistics revealed notable fluctuations in government expenditure and PDRB, with average expenditures of 160,215.8 million and a standard deviation of 28,236.43 million. PDRB averaged 2,921,667 million with a standard deviation of 5,799,190 million, indicating substantial variability. The Granger causality test showed no significant causal relationship between PDRB and government expenditure, suggesting that changes in PDRB do not directly influence government expenditure and vice versa. This finding implies that fiscal interventions may not always directly

impact economic growth. Policymakers should focus on expenditure efficiency and strategic resource allocation, emphasizing infrastructure, education, and productive sectors to drive sustainable economic development.

**Keywords:** *Public Sector Financial Management, Economic Sustainability, Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product, Fiscal Policy.*

Copyright (c) 2024 Firman

✉ Corresponding author :

Email Address : [firmansijaya@gmail.com](mailto:firmansijaya@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan sektor publik berperan penting dalam mendukung keberlanjutan perekonomian di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut Steiss dan Nwagwu (2001), perencanaan dan pengelolaan keuangan pada organisasi publik meliputi pengelolaan anggaran, pengendalian biaya, dan perencanaan strategis yang efektif. Dalam konteks Sulawesi Selatan, penerapan praktik pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan model kematangan pengelolaan keuangan sektor publik di negara berkembang, seperti yang dikemukakan oleh Rahmani et al. (2023), menunjukkan pentingnya struktur dan sistem keuangan yang matang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Model ini menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan yang baik sebagai landasan keberlanjutan perekonomian. Di Sulawesi Selatan, penerapan dan adaptasi model serupa dapat membantu mengatasi tantangan pengelolaan keuangan dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut.

Penerapan sistem pengelolaan informasi keuangan terpadu (IFMIS) di pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengelolaan dana masyarakat. Studi oleh Ingabire dkk. (2023) di Rwanda mengungkapkan bahwa integrasi fungsi perencanaan, penganggaran dan akuntansi melalui IFMIS dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penerapan IFMIS di Sulawesi Selatan dapat membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik, yang penting bagi keberlanjutan perekonomian daerah.

Digitalisasi audit sektor publik juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perencanaan anggaran pemerintah daerah. Penelitian Lino dkk. (2023) di Brazil menunjukkan bahwa digitalisasi proses audit tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam audit, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dapat memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian keuangan publik yang penting untuk mendukung keberlanjutan perekonomian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan sektor publik terhadap keberlanjutan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif di masa depan.

### **Pengetahuan Tentang Masalah Ini**

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan perekonomian dan efisiensi operasional pemerintahan. Steiss dan Nwagwu (2001) menekankan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan pada organisasi publik

harus mencakup pengelolaan anggaran yang komprehensif, pengendalian biaya, dan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini sangat relevan bagi provinsi seperti Sulawesi Selatan yang membutuhkan sistem keuangan yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Model kematangan pengelolaan keuangan sektor publik di negara berkembang yang dikembangkan oleh Rahmani et al. (2023) menunjukkan bahwa struktur dan sistem keuangan yang matang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana masyarakat. Studi kasus di Iran menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan yang baik. Ingabire dkk. (2023) juga menyoroti pentingnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terintegrasi (IFMIS) dalam pengelolaan dana masyarakat. Studi kasus di Distrik Nyamasheke, Rwanda, menunjukkan bahwa integrasi fungsi perencanaan, penganggaran, dan akuntansi melalui IFMIS dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penerapan IFMIS di Sulawesi Selatan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Digitalisasi audit sektor publik juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perencanaan anggaran pemerintah daerah. Lino dkk. (2023) dalam studinya di Brazil menunjukkan bahwa digitalisasi proses audit meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Teknologi digital dalam audit dapat memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian keuangan publik di Sulawesi Selatan, yang penting bagi keberlanjutan perekonomian. Savignon dkk. (2019) mengeksplorasi penerapan penganggaran berbasis kinerja pada administrasi pusat di Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Penerapan metode ini di Sulawesi Selatan dapat membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah dan mendorong tercapainya hasil yang lebih baik dalam berbagai program pembangunan.

Konsep penganggaran berbasis tugas juga penting dalam perencanaan proyek sektor publik. Siemionek-Lepczyńska dan Chalastra (2023) meneliti penganggaran berbasis tugas dalam perencanaan proyek lingkungan di Polandia. Temuan mereka menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen proyek. Penerapan penganggaran berbasis tugas di Sulawesi Selatan dapat membantu memastikan alokasi sumber daya yang lebih tepat dan mendorong pencapaian hasil yang lebih baik dalam proyek-proyek lingkungan hidup.

Chowdhury dan Shil (2018) menekankan pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang kontekstual di sektor publik. Mereka menyoroti bahwa adaptasi terhadap konteks lokal sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Srithongrungrung dkk. (2019) dalam studinya tentang pengelolaan modal dan penganggaran di sektor publik juga menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi.

Küçükaycan dkk. (2021) meneliti dampak globalisasi terhadap pengelolaan keuangan publik dan proses penganggaran di Türkiye. Mereka berpendapat bahwa globalisasi telah mendorong reformasi dalam sistem keuangan publik yang mengarah pada efisiensi yang lebih besar. Abolhallaj dkk. (2021) juga membahas sistem pengelolaan keuangan baru untuk sektor kesehatan masyarakat di Iran, menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik.

Ermasova dkk. (2019) dan Ceka (2019) dalam studi mereka tentang proses penganggaran dan pengelolaan modal di Rusia dan Moldova, menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang baik sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan modal yang sistematis dan terpadu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

Anyanwu dkk. (2022) meneliti hubungan antara manajemen keuangan sektor publik dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Nigeria. Mereka menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka

panjang. Hraeja (2022) mengevaluasi kinerja keuangan unit sektor publik menggunakan perspektif penganggaran tradisional dan menemukan bahwa meskipun pendekatan tradisional masih relevan, terdapat kebutuhan untuk reformasi yang lebih inovatif dalam pengelolaan keuangan publik.

Kajian hubungan perencanaan anggaran dan kinerja keuangan oleh Chepkorir dkk. (2021 di Kenya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung pentingnya perencanaan anggaran yang menyeluruh dan berbasis data dalam mencapai tujuan keuangan dan pembangunan daerah.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain *ex-post facto*, artinya data dikumpulkan setelah peristiwa terjadi, dan dilakukan analisis untuk mencari hubungan antar variabel yang ada. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh pengelolaan keuangan sektor publik terhadap keberlanjutan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Data dikumpulkan secara cermat dari berbagai sumber resmi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan laporan anggaran pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Periode yang diteliti adalah tahun 2012 hingga 2023 untuk memastikan cakupan data yang memadai dan relevan. Data ini mencakup indikator perekonomian utama seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan total belanja pemerintah daerah.

Tabel 1. EXPENSE dan PDRB

Tahun	EXPENSE	PDRB
2012	11.504.508.955	20.218.458.770
2013	12.590.413.054	21.758.913.210
2014	13.236.366.483	23.398.805.061
2015	13.686.232.637	25.080.299.305
2016	14.765.707.534	26.940.131.345
2017	17.384.598.850	28.881.417.111
2018	16.480.851.141	30.915.619.323
2019	17.429.693.174	33.050.637.626
2020	17.220.364.631	32.815.457.191
2021	18.139.033.491	34.339.540.860
2022	19.404.326.571	36.089.501.673
2023	20.417.306.141	37.716.217.484

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan sebagai variabel dependen yang diukur dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Variabel independen meliputi total belanja pemerintah daerah (TPG). Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan literatur yang menunjukkan hubungan signifikan antara pengelolaan keuangan sektor publik dan pertumbuhan ekonomi (Rahmani et al., 2023; Ingabire et al., 2023).

Langkah pertama dalam analisis ekonometrik adalah menentukan stasioneritas data menggunakan Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan tren atau variabilitas dari waktu ke waktu, yang dapat mempengaruhi hasil analisis lebih lanjut (Anyanwu et al., 2022). Uji ADF akan membantu dalam mengidentifikasi apakah variabel-variabel tersebut stasioner pada suatu tingkat atau memerlukan diferensiasi lebih lanjut.

Setelah dilakukan uji stasioneritas, dilakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik dasar data. Statistik deskriptif seperti mean, median, standar deviasi, dan range digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang sebaran data. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi pola awal dan potensi anomali dalam data (Steiss & Nwagwu, 2001).

Uji Kausalitas Granger digunakan untuk menguji pengaruh kausal antara pengelolaan keuangan sektor publik dengan pertumbuhan ekonomi. Pengujian ini membantu dalam menentukan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut, apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Tes ini penting untuk memahami dinamika antara kebijakan keuangan dan hasil perekonomian (Chowdhury & Shil, 2018).

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik EViews. Proses pengolahan data meliputi pembersihan data, pengujian stasioneritas, analisis deskriptif, dan pengujian kausalitas Granger. Setiap langkah dilakukan secara hati-hati untuk menjamin integritas dan validitas hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Uji stasioneritas adalah langkah pertama yang penting dalam analisis ekonometrik untuk memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan tren atau variabilitas seiring waktu. Dalam konteks ini, dua variabel penting yang diuji adalah EXPENSE (belanja) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hasil uji ADF akan membantu dalam mengidentifikasi apakah kedua variabel ini stasioner pada suatu level atau memerlukan diferensiasi lebih lanjut. Keputusan ini penting untuk langkah analisis selanjutnya, termasuk pemodelan ekonometrik dan pengujian hipotesis.

Tabel 2. Hasil Pengujian ADF

Variabel	Statistik Uji ADF	Nilai Tes pada 5%	Komentar
EXPENSE	-0,603708	-3.175352	Tidak bergerak
PDRB	-0,693938	-3.173552	Tidak bergerak

Hasil pengujian ADF pada variabel EXPENSE menunjukkan nilai statistik pengujian sebesar -0.603708. Dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 5% sebesar -3,175352, maka nilai statistik uji lebih tinggi (lebih positif). Hal ini menunjukkan bahwa variabel EXPENSE stasioner. Oleh karena itu, tidak diperlukan transformasi tambahan seperti diferensiasi untuk membuat data ini stasioner. Kondisi stasioner ini menunjukkan bahwa variabel EXPENSE tidak mempunyai tren atau pola sistematis yang berubah seiring berjalannya waktu, hal ini penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Untuk variabel PDRB, nilai statistik uji ADF yang diperoleh sebesar -0.693938. Hal ini juga lebih tinggi dari nilai kritis pada taraf signifikansi 5% yaitu -3.173552. Sama halnya dengan EXPENSE, hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB juga stasioner. Stasioneritas PDRB berarti fluktuasi data PDRB tidak mempunyai tren jangka panjang sehingga perlu diperhitungkan atau dihilangkan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Hal ini menyederhanakan proses pemodelan dan analisis karena data cocok digunakan dalam berbagai model ekonometrik tanpa memerlukan modifikasi tambahan.

Stasioneritas variabel EXPENSE dan PDRB mempunyai implikasi penting dalam konteks pemodelan ekonometrik. Dengan data EXPENSE dan PDRB yang stasioner, analisis hubungan dinamis antara belanja dan PDRB dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Kesimpulannya, hasil uji ADF menunjukkan bahwa variabel EXPENSE dan PDRB stasioner pada levelnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut siap digunakan dalam analisis lebih lanjut tanpa memerlukan transformasi tambahan.

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang digunakan dalam analisis. Dengan memahami rata-rata (mean), median, maksimum (max), minimum (min), dan standar deviasi (std. dev.), kita dapat memperoleh wawasan awal tentang distribusi dan variabilitas data. Dalam konteks ini, dua variabel yang dianalisis adalah EXPENSE (belanja) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Tabel 3. Sifat Deskriptif Data

	<b>Berarti</b>	<b>median</b>	<b>Maks</b>	<b>Minimal</b>	<b>Std. Dev.</b>
EXPENSE	160215.8	168505.5	204173.0	115045.0	28236.43
PDRB	2.921.667	2.985.000	3.770.000	2.020.000	5.799.190

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh rata-rata (mean) variabel EXPENSE sebesar 160.215,8. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran selama periode yang dianalisis adalah sekitar 160.215,8. Median EXPENSE adalah 168.505,5 yang menunjukkan bahwa nilai median distribusi pengeluaran sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai mean. Nilai EXPENSE maksimum sebesar 204.173,0, sedangkan nilai minimum sebesar 115.045.0. Kisaran antara nilai maksimum dan minimum ini menunjukkan variasi pengeluaran yang signifikan. Standar deviasi sebesar 28.236,43 menunjukkan tingkat variabilitas atau sebaran data dari rata-rata yang relatif moderat dalam konteks pengeluaran.

Untuk variabel PDRB rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 2.921.667. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata PDRB selama periode yang dianalisis adalah sekitar 2.921.667. PDRB median adalah 2.985.000, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata, yang menunjukkan distribusi yang mungkin sedikit condong ke kiri. Nilai maksimum PDRB sebesar 3.770.000, sedangkan nilai minimum sebesar 2.020.000. Variasi yang besar antara nilai maksimum dan minimum ini menunjukkan adanya perubahan signifikan pada PDRB selama periode analisis. Standar deviasi sebesar 5.799.190 menunjukkan tingkat variabilitas PDRB yang tinggi, yang menunjukkan fluktuasi besar pada data tersebut.

Perbandingan antara variabel EXPENSE dan PDRB menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, variabilitas PDRB jauh lebih besar dibandingkan EXPENSE, hal ini terlihat dari standar deviasi PDRB yang lebih tinggi (5.799.190) dibandingkan EXPENSE (28.236,43). Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi PDRB lebih signifikan dibandingkan fluktuasi pengeluaran. Selain itu, nilai median yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata kedua variabel menunjukkan bahwa distribusi data mungkin sedikit condong ke kiri, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Hasil statistik deskriptif ini memberikan wawasan awal yang penting untuk analisis lebih lanjut. Variabilitas PDRB dan EXPENSE yang signifikan menunjukkan perlunya analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi tersebut.

Uji kausalitas Granger merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel waktu dapat digunakan untuk memprediksi variabel waktu yang lain. Dalam analisis ini kami menguji hubungan sebab akibat antara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan EXPENSE (belanja) dengan hipotesis nol bahwa PDRB tidak menyebabkan

pengeluaran dan sebaliknya. Hasil pengujian ini memberikan gambaran arah dan kekuatan hubungan kedua variabel.

Tabel 4. Uji Kausalitas Granger

Hipotesis Nol:	Ob	F-Statistik	Masalah.
PDRB does not Granger Cause EXPENSE	12	0,74561	0,5207
EXPENSE does not Granger Cause PDRB		1.11512	0,3977

Hipotesis nol pertama yang diuji adalah “PDRB tidak menimbulkan EXPENSE”. Dari hasil pengujian diperoleh F-Statistic sebesar 0.74561 dengan probabilitas (Prob.) sebesar 0.5207. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi umum (biasanya 0,05), kita gagal menolak hipotesis nol. Artinya, berdasarkan data yang ada, belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa PDRB menyebabkan perubahan pengeluaran (EXPENSE).

Hipotesis nol kedua yang diuji adalah “EXPENSE tidak menyebabkan PDRB”. Hasil pengujian menunjukkan F-Statistic sebesar 1.11512 dengan probabilitas (Prob.) sebesar 0.3977. Sama seperti sebelumnya, nilai probabilitas ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pengeluaran (EXPENSE) menyebabkan perubahan PDRB.

Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan tidak terdapat hubungan sebab akibat yang signifikan antara PDRB dengan pengeluaran (EXPENSE) dua arah. Artinya berdasarkan data yang ada, perubahan PDRB tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan pengeluaran, dan sebaliknya, perubahan pengeluaran tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan PDRB.

## **SIMPULAN**

Pengelolaan keuangan sektor publik mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai keberlanjutan perekonomian suatu daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan, analisis pengeluaran pemerintah (EXPENSE) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Melalui penggunaan alat analisis ekonometrik seperti Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), statistik deskriptif, dan uji kausalitas Granger, kita dapat memahami dampak pengelolaan keuangan sektor publik terhadap keberlanjutan perekonomian provinsi ini.

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan pada pengeluaran pemerintah dan PDRB selama periode penelitian dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Rata-rata pengeluaran pemerintah sebesar 160215,8 juta dengan standar deviasi sebesar 28236,43 juta, sedangkan PDRB memiliki rata-rata sebesar 2921667 juta dengan standar deviasi. dari 5799190 juta. Fluktuasi ini mencerminkan tingginya variabilitas belanja pemerintah dan PDRB, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan kebijakan.

Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas yang signifikan antara PDRB dengan belanja pemerintah. Artinya perubahan PDRB tidak secara langsung menyebabkan perubahan belanja pemerintah, begitu pula sebaliknya. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa intervensi kebijakan fiskal tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang sering diasumsikan.

Tidak adanya hubungan sebab akibat yang signifikan antara PDRB dan pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dirancang dengan lebih hati-hati. Para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak serta merta langsung memicu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, fokus pada efisiensi belanja dan alokasi sumber daya yang tepat mungkin lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Efisiensi belanja pemerintah merupakan faktor kunci dalam mencapai keberlanjutan perekonomian. Dengan memastikan dana publik digunakan secara optimal untuk proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi nyata, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, dan sektor produktif lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian jangka panjang.

Temuan-temuan dari analisis ini mempunyai implikasi penting bagi para pembuat kebijakan. Karena tidak ada hubungan sebab akibat yang signifikan antara PDRB dan belanja pemerintah, kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi PDRB melalui belanja pemerintah atau sebaliknya mungkin tidak efektif. Para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin lebih signifikan dalam mempengaruhi PDRB dan belanja pemerintah.

## **References**

- Alan Walter Steiss, Steiss, A. W., Emeka O. Cyprian Nwagwu, & Nwagwu, E. O. C. (2001). *Financial planning and management in public organizations*. <https://doi.org/10.4324/9781482270938>
- Ali Rahmani, Parisa Saadat Behbahaninia, Mona Parsaei, & Mahnaz Mahmoudkhani. (2023). A public sector financial management maturity model for developing countries: The case of Iran. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/00208523231195707>
- Aline Ingabire, C. N. Luwesi, Mohamed Diarra Abdoulaye, & Izerimana Modeste. (2023). Analysis Of Planning, Budgeting And Accounting Functions Of Integrated Financial Management Information Systems (Ifmis) And Public Funds Management In The Local Government - The Case Of Nyamasheke District, Rwanda. *European Journal of Economic and Financial Research*. <https://doi.org/10.46827/ejefr.v7i4.1595>
- André Feliciano Lino, Ricardo Rocha de Azevedo, & Guilherme Simões Belote. (2023). The influence of public sector audit digitalisation on local government budget planning: Evidence from Brazil. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(2), 198–218. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-05-2022-0090>
- Andrea Bonomi Savignon, Andrea Bonomi Savignon, Savignon, A. B., Lorenzo Costumato, Costumato, L., Benedetta Marchese, Benedetta Marchese, & Marchese, B. (2019). Performance budgeting in context: An analysis of Italian central administrations. *Administrative Sciences*, 9(4), 79. <https://doi.org/10.3390/admsci9040079>

- Anna SIEMIONEK- Lepczyńska & Michał Chalastra. (2023). Task-Based Budgeting in Environmental Projects Planning: A Case Study of a Manufacturing Company in Poland. *Journal of Environmental Management and Tourism*. [https://doi.org/10.14505/jemt.v14.7\(71\).13](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.7(71).13)
- Anup Chowdhury, Chowdhury, A., Nikhil Chandra Shil, & Shil, N. C. (2018). CONTEXTUALIZING PLANNING AND BUDGETING SYSTEMS: PUBLIC SECTOR EXPERIENCE. 13(2), 27-53.
- Arwiphawee Srithongrung, Arwiphawee Srithongrung, Srithongrung, A., Arwiphawee Srithongrung, Natalia Ermasova, Ermasova, N., Yusuf Yusuf, & Yusuf. (2019). Capital Management and Budgeting in the Public Sector. *Advances in Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7329-6>
- Chowdhury, A., & Shil, N. C. (2018). *Contextualizing planning and budgeting system: Public sector experience / Anup Chowdhury and Nikhil Chandra Shil*.
- Durdane Küçükaycan, Küçükaycan, D., Gonca Güngör Göksu, & Göksu, G. G. (2021). *The Effects of Globalization on Turkish Public Financial Management and Budget Processes*. 273-286. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4459-4.ch015>
- Erica Ceka, & Ceka, E. (2019). Public Capital Budgeting and Management Process in Moldova. *Capital Management and Budgeting in the Public Sector*, 134-156. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7329-6.ch007>
- Felicia Akujinma Anyanwu, Felicia Akujinma Anyanwu, Amalachukwu Chijindu Ananwude, & Amalachukwu Chijindu Ananwude. (2022). Public Sector Financial Management and Economic Growth Sustainability in Nigeria: 1986 to 2020. *Journal La Bisecoman*, 2(6), 11-22. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v2i6.546>
- Gonca Güngör Göksu, Goksu, G. G., Mehmet Emin Altundemir, & Altundemir, M. E. (2017). Performance-Based Budgeting on Strategic Planning: The Case Study in Turkish Higher Education System. *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*, 3(3), 263-270. <https://doi.org/10.18844/gjhss.v3i3.1568>
- Indrawati Yuhertiana, & Yuhertiana, I. (2015). *Behavioural public sector accounting research in Indonesia: A literature review / Indrawati Yuhertiana*. <https://doi.org/10.24191/mar.v14i1.348>
- Laurence Ferry, Ferry, L., Peter Eckersley, & Eckersley, P. (2012). Budgeting and governing for deficit reduction in the UK public sector: Act 2 'the annual budget.' *Public Money & Management*, 32(2), 119-126. <https://doi.org/10.1080/09540962.2012.656017>
- Margret Chepkorir, None Margret Chepkorir, Willy Rugutt, None Dr. Willy Rugutt, Penina Chepkorir Langat, & None Dr. Penina Langat. (n.d.). RELATIONSHIP BETWEEN BUDGETARY PLANNING AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COUNTY GOVERNMENT OF KERICHO, KENYA. *EPRA International Journal of Economics, Business and Management*. <https://doi.org/10.36713/epra7765>

- Masoud Abolhallaj, Masoud Abolhallaj, Mehdi Jafari, Jafari, M., Hesam Seyedin, Seyedin, H., Masoud Salehi, Salehi, M., Arefeh Pourtaleb, Pourtaleb, A., Keyvan Rahmani, Rahmani, K., Seyede-Elahe Hosseini, & Hosseini, S.-E. (2021). New financial management system for Iran public health sector: A qualitative study. *Journal of Education and Health Promotion, 10*(1), 356. [https://doi.org/10.4103/jehp.jehp\\_1201\\_20](https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1201_20)
- Muya, J. N., & Nyabwari, D. M. (2016). The influence of procurement planning on procurement performance in the public sector in Kenya: A critical review of literature. *Business and Management Research, 2*(1).
- Natalia Ermasova, Ermasova, N., Polina Ermasova, & Ermasova, P. (2019). Public Capital Budgeting and Management Process in Russia. *Capital Management and Budgeting in the Public Sector, 113–133*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7329-6.ch006>
- Olefhile Mosweu, & Mosweu, O. (2019). Management of authentic digital accounting records in an enterprise resource planning system in the public sector of Botswana. *ESARBICA Journal: Journal of the Eastern and Southern Africa Regional Branch of the International Council on Archives, 38*(1), 1–20. <https://doi.org/10.4314/esarjo.v38i1.1>
- Raad Abdmislem Hraeja. (2022). EVALUATING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR UNITS USING THE TRADITIONAL BUDGETING PERSPECTIVE. *Akkad Journal Of Contemporary Accounting Studies, 1*(3), 182–195. <https://doi.org/10.55202/ajcas.v1i3.15>
- Radosław Milewski, Milewski, R., Magdalena Tomasiewicz, & Tomasiewicz, M. (2019). Model of performance-based budget planning in public sector entities. *Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 192*(2), 335–348. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2608>
- Stephen Aro-Gordon & Stephen Aro Gordon. (2022). Determinants of Sustainable Capital Budgeting Practice: A Structural Equation Modelling Approach. *Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding, 13*(1), 1–1. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.1\(52\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.1(52))
- Svetlana S. Galazova, & Galazova, S. S. (2019). Planning and financing in the social development. *International Journal of Economics and Business Administration, 108–115*. <https://doi.org/10.35808/ijeba/375>